

LAMPIRAN

HUSUS JAMKESMAS: Tak Ada Jaminan, Pasien Misk... <http://www.solopos.com/2012/02/27/laporan-khusus-jamkesmas>

aminan, Pasien Miskin Makin Merana

min, 27 Februari 2012 04:31 WIB || Dilihat: 6230 Kali

ZALORA
PUSAT FASHION ONLINE

TOLLIVER™
SUEDE WEDGES
Rp 199.000

GRATIS PENGIRIMAN &
7 HARI UANG KEMBALI!

BELI SEKARANG ►

Mata Marsudi menerawang. Badannya yang lemah terbaring di atas ranjang. Satu tangannya terkepal, satunya lagi mendekap dadanya yang terbalut kemeja tipis warna biru hitam. Walau badannya menggigil namun kuku-kuku jarinya tak lantas menjadi pucat melainkan menguning senada dengan warna matanya.



(JIBI/SOLOPOS/dok)

tengah menderita hepatitis B yang lebih populer disebut penyakit kuning. Walau sudah lebih dari dua tahun menderita penyakit ini, baru Kamis (23/2/2012) lalu, Marsudi masuk RSUD Sukoharjo. Itu pun bukan keinginanannya sendiri melainkan karena paksaan kakak perempuannya. Maklumlah dengan statusnya pengangguran, Marsudi tak berani meminta layanan kesehatan dari RS. Bapak dari dua anak ini terpaksa bekerja karena kondisi fisiknya yang makin lama makin lemah akibat sakit kuning yang parah. Makanan konsumsi dimuntahkan kembali.

ya ingin mendapat pengobatan namun Marsudi justru bersikukuh menjauhi RS. Tak adanya Jaminan dan Masyarakat (Jamkesmas) serta tak masuknya nama dia dalam Surat Keputusan (SK) Bupati tentang miskin membuat Marsudi mengharamkan RS dari benaknya. Sejumlah kerabat Marsudi duduk berjejer di ranjang. Mereka tampak serius membahas sesuatu sambil membolak-balik sebendel kertas fotokopian. Tu rupanya milik pasien dari bilik sebelah yang baru saja meninggalkan RS setelah mendapat keringanan aran RS. Surai permohonan keringanan biaya RS itu tertinggal.

agaimana lagi kalau Bupati sudah menghapus surat keterangan tidak mampu (SKTM) ya kami tidak bisa minta bantuan. Mungkin ya kami bisa meniru permohonan keringanan biaya seperti ini saja," usul sang Eni.

uara diskusi keluarga mengganggu istirahatnya, Marsudi memilih diam. Seakan tak mau dengar, satu ia angkat hingga menutup wajahnya yang hitam.

saya khawatirkan terjadi juga. Inilah sebabnya selama ini saya selalu menolak kalau dibawa ke RS. Saya ik bisa bayar dan ternyata benar kan. Sekarang ini sebenarnya saya cuma ingin pulang daripada ikn keluarga. Diobati di rumah saja sebenarnya tidak apa-apa," keluh Marsudi pendek. "Sudah tidak ipikir. Yang penting istirahat biar cepat sembuh," balas Eni kepada Marsudi.

i keluarga pun berlanjut sementara Marsudi kembali beristirahat. Eni pun menyimpan dokumen honan keringan biaya ke dalam tas. "Kami sungguh bingung kenapa kok SKTM dihentikan. Padahal yang ya warga miskin itu kan banyak dan hanya sedikit yang masuk dalam data Jamkesmas maupun Jamkesda. gga saya misalnya, banyak sekali yang miskin tapi yang dapat Jamkesmas bisa dihitung dengan jari. Yang imo Jamkesda juga demikian," ujarnya.

la keluarga Marsudi dibuat kalang kabut dengan kebijakan Bupati yang menghapus SKTM. Eni berharap i tersebut tidak menimpakeluarga miskin yang lain. "Semoga kebijakan ini segera diperbaiki. Kami ap SKTM bisa diberlakukan lagi sebab masih banyak yang masih membutuhkan," harap Eni.

gungan yang dialami keluarga Marsudi makin menambah panjang daftar persoalan yang muncul kebijakan penghapusan SKTM yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 16/2012 tentang Jaminan anan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/Atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo. Apabila pada sebelumnya, warga miskin yang tidak terkaver dalam Jamkesmas maupun database daerah tentang gakin

mendapat bantuan pembayaran RS dengan berbekal SKTM, kondisi tersebut kini tak berlaku lagi.

Masyarakat

bukan tanpa sebab Bupati mengeluarkan kebijakan tersebut. Wakil Bupati, Haryanto, menyatakan san SKTM dipicu oleh perilaku masyarakat yang sebenarnya tidak miskin namun mengaku-aku sebagai skin hingga membuat keuangan daerah kacau. Catatan RSUD Sukoharjo menyebut dari seluruh pasien tahun lalu, sebesar 57% menggunakan fasilitas SKTM sehingga biaya perawatan ditanggung ah.

menerangkan pada tahun lalu di luar kuota Jamkesmas dan Jamkesda Pemkab juga menyediakan dana bagi gakin yang menggunakan SKTM. "Namun setelah dievaluasi ternyata jumlah pasien yang akan SKTM ini banyak sekali dan tidak semuanya ternyata warga tidak mampu. Banyak juga yang kaya mengakses SKTM hanya gara-gara kelurahan atau pihak desa *pekewuh*. Nah penghapusan kebijakan adalah upaya kami membatasi wewenang lurah dalam membuat SKTM supaya anggaran daerah tak kak seperti kemarin," jelas Haryanto.

yebut dana untuk Jamkesda pada tahun kemarin mencapai Rp 3,6 miliar sementara pada tahun ini hanya uta.

KTM, tambah Haryanto, sebenarnya Sukoharjo juga tidak akan dianda masalah sebab kuota Jamkesmas biih dari cukup. Jumlah warga miskin 174.150 orang sedangkan kuota Jamkesmas dari pemerintah pusat orang. Sehingga, masih ada sisa kuota sebanyak 101.112 orang.

elihatannya tak ada masalah namun anggota Komisi IV DPRD, Giyarto, justru menyangsikannya. "Apakah bisa menjamin bahwa 174.150 gakin benar-benar bisa masuk kuota Jamkesmas yang mencapai 200.000? Bagaimana scandainya ada warga yang sudah masuk dalam SK Bupati tentang Gakin tetapi tidak kuota Jamkesmas sementara anggaran Jamkesda hanya Rp 750 juta," ujarnya. Belum lagi, imbuh Giyarto, Pemkab juga sudah memikirkan kemungkinan adanya gakin yang masih tercecer di luar SK Bupati. nasuk dalam SK saja nasibnya belum jelas apalagi yang belum masuk. Bagaimana lantas solusi untuk ini," ya.

Sosbud Bappeda, Margiyanto, mengaku Pemkab tidak bisa menjamin semua nama gakin dalam SK Bupati dalam kuota Jamkesmas. Sebab, hingga saat ini Pemkab belum bisa mengakses *by name by address* (nama mat) calon penerima Jamkesmas berdasarkan data BPS.

unto menambahkan, setelah langkah Pemkab menanyakan data calon penerima Jamkesmas kepada BPS Bupati mencoba bertanya kepada Kementerian Kesehatan. "Sampai sekarang kami benar-benar belum apa saja penerima Jamkesmas. Jadi kalau bagaimana nasib gakin versi SK Bupati ya ada kemungkinan nasuk dalam kuota Jamkesmas," tegas Margiyanto.

ah sementara yang bisa dilakukan Bappeda adalah melakukan pelacakan penerima Jamkesmas yang sudah tu yang mengacu kepada data BPS 2008. Satu per satu secara manual nama-nama mereka dicocokkan. gnya soal hasil, Margiyanto memilih bungkam. Jawaban justru dilontarkan oleh Wabup, Haryanto. asarkan laporan yang saya terima dari Bappeda, dari 12 kecamatan sudah tergarap delapan kecamatan pekan ini tambah satu jadi sembilan yang sudah tergarap. Nah dari pencocokan sementara itu muncul 50% yang artinya separo gakin dalam SK Bupati tidak masuk sebagai penerima Jamkesmas (setara 5 orang-red). Ya cukup repot memang kalau begini. Tapi kami masih mencari solusi yang terbaik," iya.

bisa dinanti namun tidak demikian bagi pasien miskin yang sekarang dirawat di RSUD. Bagi mereka bukan yang terpenting namun dana segar yang bisa mengeluarkan mereka dari RS. Sebuah harapan yang ngkinan besar hanya menjadi harapan karena menurut Direktur RSUD Sukoharjo, Gunadi, anggaran untuk esda akan habis tepat pada akhir bulan ini.

M berlaku atau tidak, anggaran Jamkesda tetap akan habis pada akhir bulan ini. Solusi sementara yang ambil untuk pasien miskin yang tidak masuk dalam kuota Jamkesmas maupun Jamkesda adalah tetap rimanya karena bagaimanapun RS kan tidak bolch menolak pasien. Masalahnya karcna RS juga tidak

ggaran maka kekurangan pembayaran atas pasien miskin nantinya tetap kami catat sebagai utang."

LOPOS/Ayu Prawitasari

uga:

emkab Sukoharjo Programkan Sertifikat Tanah Gratis Bagi Gakin
ILKADES SUKOHARJO, 386 Bacakades Bertarung di Kota Makmur
PENGHARGAAN MURI
ACIK JAMU TRADISIONAL
AKSI ANTIPORNOGRAFI

Bambang Aris Sasongko | Dalam : Pilihan, Sukoharjo |



Lomba Menulis Disabilitas Berhadiah Rp14juta



TRADISI I SURA: Kepala Kerbau Diarak ke

Lereng Atas Merapi



Ke Markas Rayo: Barca Menang Besar 5 Gol Tanpa Balas



El Shaarawy Tentukan Kemenangan Milan Atas Genoa

nt Jamkesmas, Dinas Kesehatan Di

EMBER 2011 10:47



gai janji-janji basi yang terus digembar-gemborkan oleh pemerintah sebagai senjata untuk rakyat dan sebatas penitraaan.

wal dari ditemuiannya salah seorang warga dari Kabupaten Pohuwato yang tergolong kurang identia penyakit Kista, dimana terjadi pembengkakan diperlukan seperti ibu yang sedang hamil dan Nia Moodumbi (18thn) yang sudah hampir 5 bulan menderita penyakit ganas tersebut agaimana yang dioraskan, hal ini tidak mendapat respon yang serius dari pihak Rumah Sakit . Pasien yang dirujuk dari Rumah Sakit Pohuwato ini pun dipulangkan oleh pihak RSAS hanya ik memiliki biaya perawatan Yang lebih disayangkan lagi, ketika di RSAS Nia hanya an tanpa ada pelayanan yang optimal dari RS.

surut keberangan miskin yang dibewanya dari pemerintah Kabupaten Pohuwato tidak lagi an dari pihak RSAS adalah surutnya tidak berlaku lagi. * Dan kesimpulan yang diambil oleh S , pasien harus dipulangkan dan harus membayar biaya perawatan selama di RSAS tanpa yang jelas ungkap salah seorang orator.

ya, mereka menyatakan sikap, meminta Kapala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk enangari masalah ini. Mengimbau kepada pemerintah agar Jaminan Kesehatan untuk it kurang mampu benar-benar tepat sasaran, bukan hanya sebatas menjalankan program, mereka juga meminta kepada pemerintah, agar pihak Rumah Sakit yang menimbang pilh agar segera ditindaki.

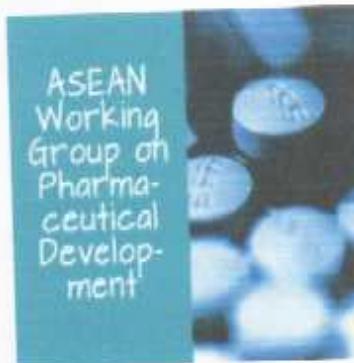
yang berlangsung aman ini pun segera dihadapi oleh Kapala Dinas Kesehatan Provinsi dr. Suhardi M. Nur,MM yang saat itu sedang berada di ruangannya. Kadinkes menilai demo ukian itu adalah salah alamat, sebab Rumah Sakit Aloe Seboe adalah kewenangan pemerintah entialo. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo hanya sebatas penyedia anggaran, sedangkan yang ut hal teknis semacam itu adalah tanggung jawab atau urusan dari pemerintah Kota Gorontalo. sehatan Provinsi tidak boleh mengintervensi langsung wewenang yang ada di Kabupaten/Kota Suhardi Nur.

juga masalah yang disuarakan oleh mereka tidak memiliki informasi yang akurat mengapa Surat an Kurang Mampu (SKTM) pasien tidak dapat diterima oleh pihak RSAS, juga tentang kapan ssuk di RSAS. Sehingga pihak Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Kesehatan sulit menanggapi tersebut.

benarnya akan siap membantu pasien, namun berdasarkan prosedur yang berlaku", tutur

rs itu, Kapala Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Afriyani M,Mkes mengatakan selama ini jika ada masalah samacam itu, biasanya pihak keluarga pasien in datang langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk mengurus perpanjangan SKTM salah anggaran jaminan kesehatan yang sudah habis masanya. * Karena batas pelayanan di RS sion Jamkesmas hanya sampai tanggal 22 Desember 2011 kemarin, namun tidak menuntut unan jika ada pasien yang masuk setelah tanggal 22 tetap akan dileyari, yang nantinya untuk

ikdan Sehat



(highslide type="slideshow-controlbar" height="60"

Video

Polling Web

Menurut Anda
Bagaimana Tampilan
Situs Ini ?

- Bagus
- Biasa
- Simple
- Jelek

Pilih Hasil

User

11 registered
2 today
8 this week
8 this month
Last: wraxuche

akan ditangguangi melalui anggaran Jamkesprov tahun 2012" ungkap Afriyani Katili.(Ar-)
[< Sebelumnya](#) [Selanjutnya >](#)



12 dinkes.gorontalo.web.id. Difindungi oleh Undang-undang Designed by [Dinkes Team](#)
uv.gorontalo@gmail.com.

MEDIA MEMBANGUN GERAKAN RAKYAT

office

GERAT
gang V, no. 4
082 Jombang 61412
dab_soerat@gmail.com
lah_soerat.blogspot.com



majalah

SOERAT[Suara
Rakyat
Jawa]

ditulis oleh:
alha-RIKA, Difaa, SuAR,
ICDHRE, Punden, Paricara

SOERAT

RAT terbit perdana pada bulan Maret
bulan, yang didistribusikan setiap
i adalah majalah komunitas yang
tertib, disiplin dan berpihak pada
nasarakat yang terpinggirkan.
ntuk mensupport kegiatan
sua rakyat yang dilakukan oleh com
ni, Alharka Jombang, Punden
faa Madiun, Paricara Tulungagung,
era Kediri, dan ICDHRE Jombang
i lima wilayah Mataran, Jombang,
idun, Tulungagung, dan Kediri, serta
Mojokerto.

ngga di empat wilayah ini sepakat
zisni yang diberi nama, *Alliansi
Maturanum Plus*. Selain menerbitkan
ans ini juga menggandakan pertemuan
bestuk pengalaman dan membiasa
pengorganisasian di wilayah masing-

SETKAN OLEH



IG SAPA ANTAR KITA

Rabu, 22 April 2009

Banyak Rakyat Miskin Tidak Mendapat Jamkesmas

(Tulungagung-Purworejo) Pihaknya kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara karena sudah
diatur dalam UUD 1945. Negara berkewajiban memenuhi hak dasar tersebut dan memberikan perlindungan
atau jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya, terutama mereka yang lemah dan hidup di bawah garis kemiskinan.
Namun fakta berbicara lain. Dalam sejumlah kasus, negara dianggap tidak memperhatikan kesehatan rakyatnya.

Tengok saja nasib pasangan Nurhadi dan Mumik Susuni, warga Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten
Tulungagung. Keluarga miskin ini hanya bisa paizah melihat penderitaan kedua anaknya, masang-masing Moh
Hasan al-Bukhoi (3 tahun) dan Desi Wulansari (1,5 tahun), yang didiagnosis mengalami microcephaly
(pengencutan kepala).

Karena tidak ada biaya untuk berobat, mereka kini cuma bisa merawat Hasan dan Desi di rumah. Berbagai
usaha sebenarnya telah dilakukan agar penyakit yang diderita kedua anaknya bisa segera sembuh. Seperti
memeriksakannya di Puskesmas dan RSUD Tulungagung sampai 2 kali. Tapi hantaran biaya yang harus
dikeluarkan mahal dan tidak punya kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Nurhadi terpaksa harus
membawa anak-anaknya kembali pulang.

Dengan kondisi seperti itu, ia mengaku sudah tidak bisa berbuat dan berkata apa-apa. Nurhadi yang
keharianya bekerja sebagai tukang pembelah batu hanya bisa berharap bantuan dari pemerintah. Tapi
sayang, tanggapannya justru mengecewakan. "Saya pernah mendatangi perangkat desa yang sulu sempat
melakukan pendatian, namun malah disemoni (dicibir) dengan jawaban, eh... rumah kamu masih layak jadi
belum ada bantuan," tutur Nurhadi menirukan kata-kata petugas.

Kepala Puskesmas Kecamatan Besuki, Anindito Aryono, menyatakan kedua anak itu sudah cacat sejak lahir
sehingga sulit diobati. Yang perlu diperhatikan adalah penanganan sejak dulu dari orang tuanya harus optimal.
Dikawatirkan microcephaly akan terjadi pada anak ketiga.

Selaku Kepala Puskesmas, pihaknya hanya bisa membantu dengan mengajak teman-teman dan petugas
Puskesmas yang luu untuk membantu keluarga Nurhadi sebagai ganti tidak adanya Jamkesmas dan Jumkesda
yang seharusnya ia terima. "Setiap seminggu atau dua minggu sekali saya diyenguk oleh Kepala Puskesmas dan
diberi susu untuk anak saya," tambah Nurhadi.

131.9 Ribu Miskin Belum Mendapat Kartu Jamkesmas
Keadaan di atas hanyalah contoh kecil dari realitas kesulitan di masyarakat. Kemungkinan masih banyak
peristiwa serupa terjadi di tempat-tempat lain. Anindito, juga mengakui kenyataan tersebut. "Itu masih satu
kasus yang coba kita carikan solusi, ada beberapa yang masih tertinggal dan belum terdata oleh kita untuk
menerima bantuan seperti Jamkesmas," jelasnya.

Pelaksanaan Jamkesmas ini sesungguhnya sudah diatur melalui SK Menteri Kesehatan No. 125 tahun 2008
tentang Pedoman Penyelenggaraan Jamkesmas dan telah disosialisasikan ke seluruh daerah. Namun demikian,
kenyataannya masih suka ada rakyat miskin yang tertinggal alias belum mendapatkan kartu Jamkesmas.

Di Kabupaten Tulungagung terdapat sekitar 69.697 keluarga miskin. Yang terdata sebagai penerima Jamkesmas
sebanyak 201.604 jiwa dan yang belum memperoleh Kartu Jamkesmas sebanyak 131.907 jiwa.

Biaya Jamkesmas sudah diunggarkan oleh pemerintah pusat namun di kabupaten belum teriksa dengan baik.
Hal ini dikarenakan sosialisasi ke tingkat bawah kurang. "Ini yang menjadi faktor mengapa realisasiya menjadi
terhambat. Yang saya sesalkan, pemerintah daerah belum memberikan tanggapan positif bagaimana
mensosialisasikan kartu Jamkesmas yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin," demikian diungkapkan Zainul
Fu'ad, salah satu pengurus Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Tulungagung.

Hal senada dikemukakan Subaili, Ketua Bantuan Tugas (Bagus) Desa Besole Kecamatan Besuki. Menurutnya,
susu ini banyak program yang diluncurkan pemerintah baik pusat maupun di daerah, namun demikian
masyarakat belum tahu mekanisme dan prosedurnya. Demikian juga dengan adanya Jamkesmas untuk orang
miskin ternyata tidak ada sosialisasinya, sehingga masyarakat miskin tidak mengerti siapa yang
berobat. "Wajar apabila mereka merasa kesulitan dan bingung untuk mengurusnya," paparnya.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menganggarkan dana kesehatan melalui RAPBD
sebesar Rp 14.255 M. Namun untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin hanya sebesar Rp 400 juta atau
2,8% dari total anggaran Dinkes. Jumlah ini tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskemas/puskesmas pembantu dan jaringannya, yang
anggarannya mencapai Rp 12.848 M atau hanya 3%.

x chat widget

K JARINGAN

TERA

inan Berita Soerat

BR

og Inl

Caleg Abuikan Persoalan Kesehatan Rakyat Miskin
Meski mungkin kesehatan rakyat miskin sampai saat ini masih menyebarkan banyak persoalan, namun partai politik dan calon legislatif (caleg) yang bersaing dalam Pemilu 9 April 2009 lalu tetap tidak peduli. Padahal, (jika jadi) mereka lah nanti yang akan ikut menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan di bidang kesehatan.

Lihat apa yang dihadirkan partai dan caleg-caleg di Kabupaten Tulungagung. Dalam pantauan SOERAT, selama kampanye Pemilu berlangsung, nyaris tidak ada tawaran program yang menarik dari partai dan caleg untuk membantu memperjuangkan nasib rakyat miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Mereka, para calon wakil rakyat itu, lebih suka berkampanye dengan memasang tanda gambar (foto) melalui baliho, banner, spanduk, poster, stiker, kartu nama dan sebagainya. Atau berkeliling membagi-bagikan berbagai bentuk alat peraga kampanye, bahkan uang, kepada masyarakat agar memilih partai dan caleg bersangkutan. Ada memang caleg yang bersedia melakukan dialog secara langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat. Namun materi yang dibahas lebih banyak masalah teknis seperti bagaimana cara menconteng yang benar. Di balik itu sebenarnya tampak ada nuansa ketakutan dari sebagian caleg untuk menyampaikan program-program yang akan diteranginya kepada masyarakat. Sebaliknya, menyampaikan program dianggap sebagai janji dan susah saat akan ditatangi oleh masyarakat jika mereka benar-benar terpilih menjadi wakil rakyat. Apalagi berdasarkan pengalaman, janji para caleg lebih banyak dianggap.

Fatalnya, muncul anggapan bahwa persoalan rakyat tidak begitu penting. Karena itu kampanye dengan menawarkan banyak program sama sekali tidak efektif dan hanya membuang-buang waktu. Toh dalam Pemilu, rakyat hanya butuh uang, bukan tawaran program yang muluk-muluk. Dengan begitu, setelah terpilih, mereka akan merasa suntai dan bekerja secnaknya lamanya tidak terbebani oleh janji-janji program saat kampanye. (Lukman, Puricara)

Dipostkan oleh MAJALAH SOERAT di 11:42

1 komentar:

Blog

1

ber (9)

a (9)

1)

7)

an Jombang Jawabatan Belum Berlaku, Bupati J...

Berikut ini adalah daftar jawaban yang belum berlaku:

mas Asep Ahmadzah di Medan

ta. Pen Pengaduan Layanan Jawabatan

K KESADARAN DI LOKALISASI Univers Al-Mustaqim Pen...

tan sebagai hak asasi, mustahak berpilkuk pad...

protes Terazatikan Karana Ketidakakuruan

(12)

ari (10)

Tim kreatif | 19 Mei 2009 14:11

Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

Balas

Server not found

Firefox can't find the server at www.blogger.com.

- Check the address for typos such as www.example.com instead of www.example.ccm.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.

Try Again

Pengunjung: 1.027.347

Sembilan

Pengunjung: 1.437.478

Langganan: [Poskan Komentar \(400\)](#)

kunjungi kami di :

■ www.suaramerdeka.com

■ m.suaramerdeka.com

SEMARANG METRO

Gerbang Metropolitan

SABTU
9 JUNI 2012

Gr
(024) 3



SMA/Muhammad Syukron

LUMPUH 20 TAHUN: Ceasar Winugrah, warga Kampung Dawung RT 3 RW 3 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, lumpuh selama 20 tahun karena saraf tulang belakangnya tidak berfungsi. (69)

Cesar, 20 Tahun Menderita Lumpuh

USIA 20 tahun, biasanya menjadinya masa ceria dimana seorang remaja sedang aktif dalam beragam kegiatan. Namun, bagi lelaki kelahiran Semarang 5 Agustus 1992 bernama Ceasar Winugrah ini, masa tersebut tidak pernah ia alami.

Anak tunggal dari pasangan Sukiman (64) dan Agustina (57) warga Kampung Dawung RT 3 RW 3 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen ini menderita kelumpuhan sejak berumur delapan bulan.

Saat ditemui *Suara Merdeka* di rumahnya, kemarin, Ceasar hanya tertidur di atas ranjang kamar berding-papan yang berhiaskan poster Presiden RI pertama Ir Soekarno dan tokoh sepakbola yang ia idolakan, Cristian Gonzales.

"Ceasar lahir normal, tapi pada usia delapan bulan ia kesulitan mengangkat kepala. Karena khawatir, saya pun membawa dia ke RS Dokter Kariadi. Ternyata, saraf tulang belakangnya tidak berfungsi. Beragam pengobatan pun sudah kami lakukan, baik medis maupun alternatif, tapi tidak membawa hasil," tutur Sukiman.

Karena berharap anak semata wayangnya itu sembuh, Sukiman memutuskan menjual rumah yang ia tempati sebelumnya di Perumahan Puri Asri Perdama Banyumanik pada 2004 untuk membayai pengobatan. Namun kondisi Ceasar tidak kun-

jung sembuh, badannya makin lemah, tidak bisa berjalan maupun menegakkan kepala atau duduk. Sukiman pun pasrah. Ia memutuskan untuk membeli sepetak tanah di Kampung Dawung dan mendirikan rumah sederhana dengan papan. Pesangon dari tempatnya bekerja telah habis untuk memberikan perhatian khusus kepada anaknya itu.

"Sejak 2004, kami hidup sederhana. Saya lebih banyak di rumah merawat Ceasar, kalau istri hanya jualan pakaian bekas yang sebulan tidak mesu laku serta jualan bändeng presto setelah berhenti bekerja sebagai suster jaga di RS Telogorejo. Bantuan pemerintah juga belum pernah kami terima," ujarnya.

Harapan melihat anaknya mampu menikmati masa remaja dan dewasa pun masih diharapkan oleh Sukiman.

Selain terus memanjatkan doa kepada Allah SWT, Sukiman berharap, pemerintah memberikan perhatian kepada anaknya itu.

Meski tidak dapat berbicara jelas, kedatangan *Suara Merdeka* siang itu disambut Ceasar dengan tawa sambil mengulurkan tangan kanannya. Ceasar mengaku sangat mengidolakan Olga Syuhputra dan Cristian Gonzales.

"Saya ingin sekali bertemu dengan Olga dan Cristian," katanya. (Muhammad Syukron-69)

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



09 Oktober 2012

nomor : 00024/B.7.3/MHK/X/2012
mpiran : Proposal
a l : Ijin Penelitian

kepada : Yth.
Rektur RS Panti Wilasa Citarum
Citarum No 98
Semarang

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : HENDRIK D.J BOROLLA

NIM : 10.93.0063

Judul Tesis :

" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN JAMKESMAS TERHADAP
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT "

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin penelitian serta informasi ataupun
data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.
Hasil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai
syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

Demikian, alas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Sekretaris Program Studi,
Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH
NPP 058-11984.006

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id

nomor : 00024/B.7.3/MHK/X/2012
mpiran : Proposal
a l : Ijin Penelitian



ipada : Yth.
rektur RSUD Tugurejo
Raya Tugurejo
Semarang

engan hormat,
alam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik
oegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :

ama : HENDRIK D.J. BOROLLA

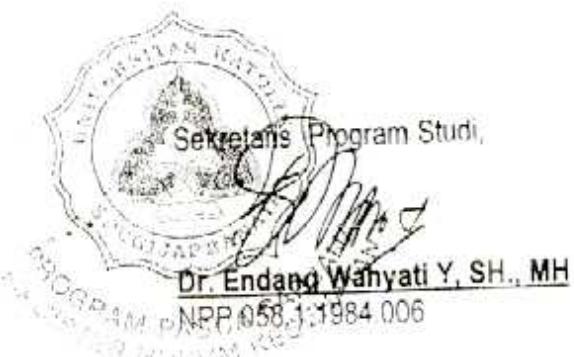
NIM : 10.93.0063

udul Tesis :

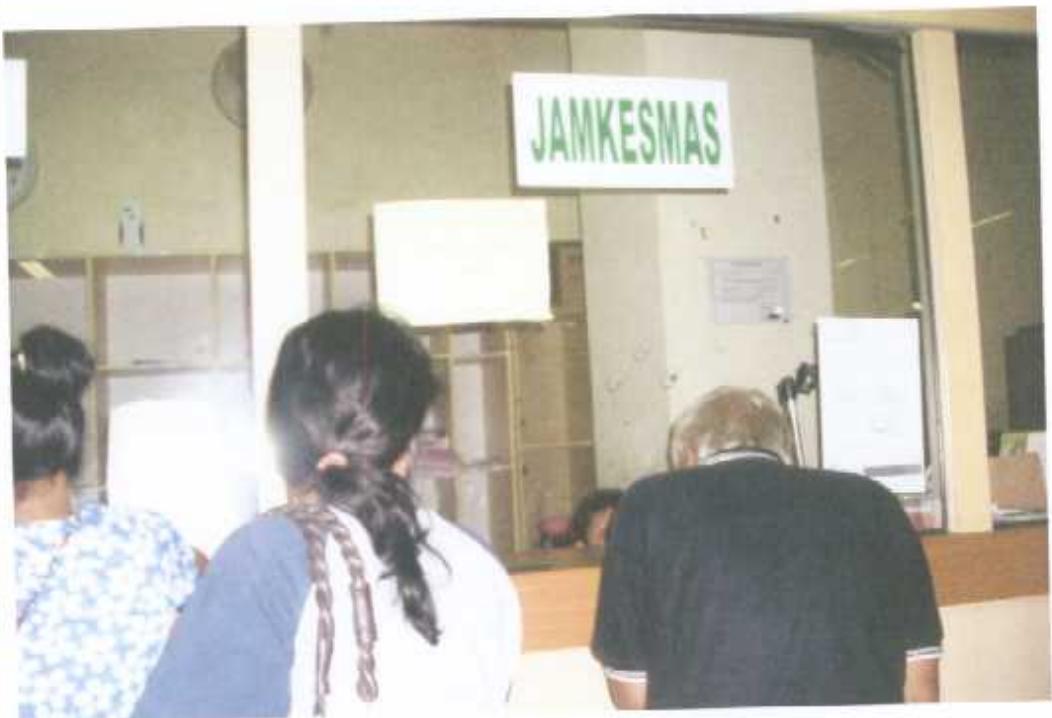
**" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN JAMKESMAS TERHADAP
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT "**

ersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin penelitian serta informasi ataupun
lata yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.
fasil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai
yarat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Lampiran Dokumentasi Penelitian di RSUD Tugurejo Semarang



Lampiran Dokumentasi Penelitian di RSUD Tugurejo Semarang



Lampiran Dokumentasi Penelitian di RSUD Tugurejo Semarang



Lampiran Dokumentasi Penelitian di RSUD Tugurejo Semarang

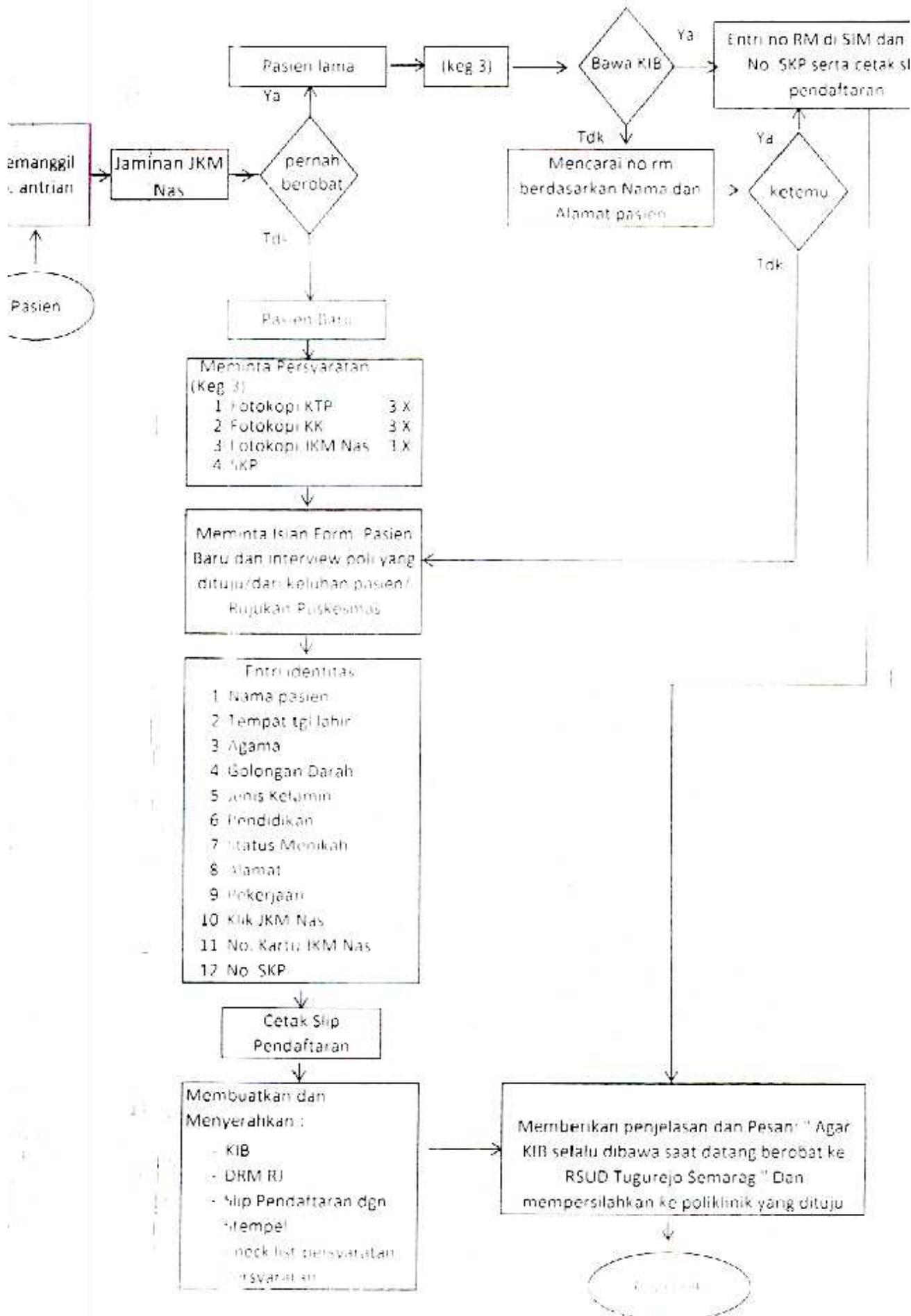


ALUR/BAGAN PELAYANAN

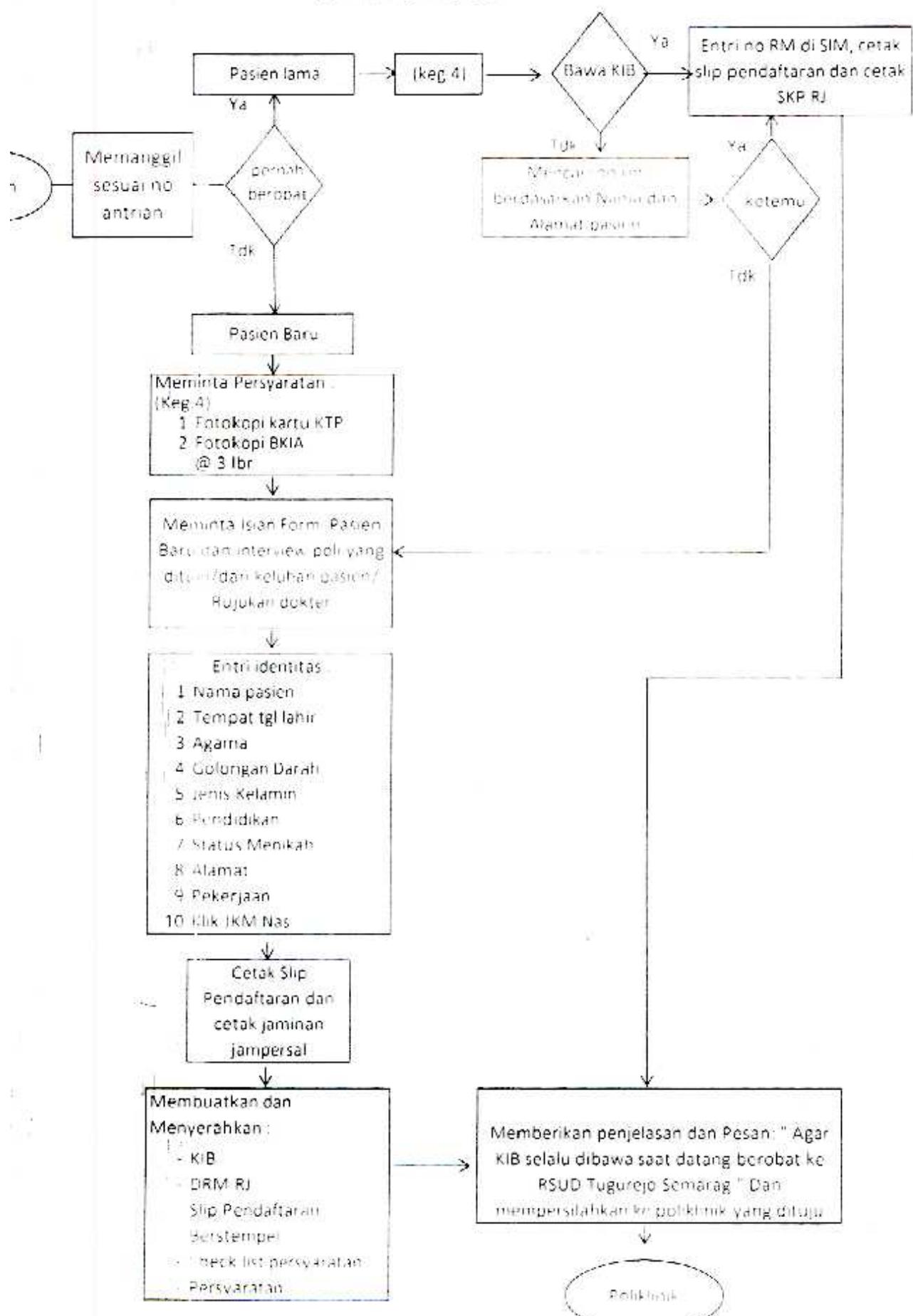
INSTALASI REKAM MEDIS

RSUD TUGUREJO SEMARANG

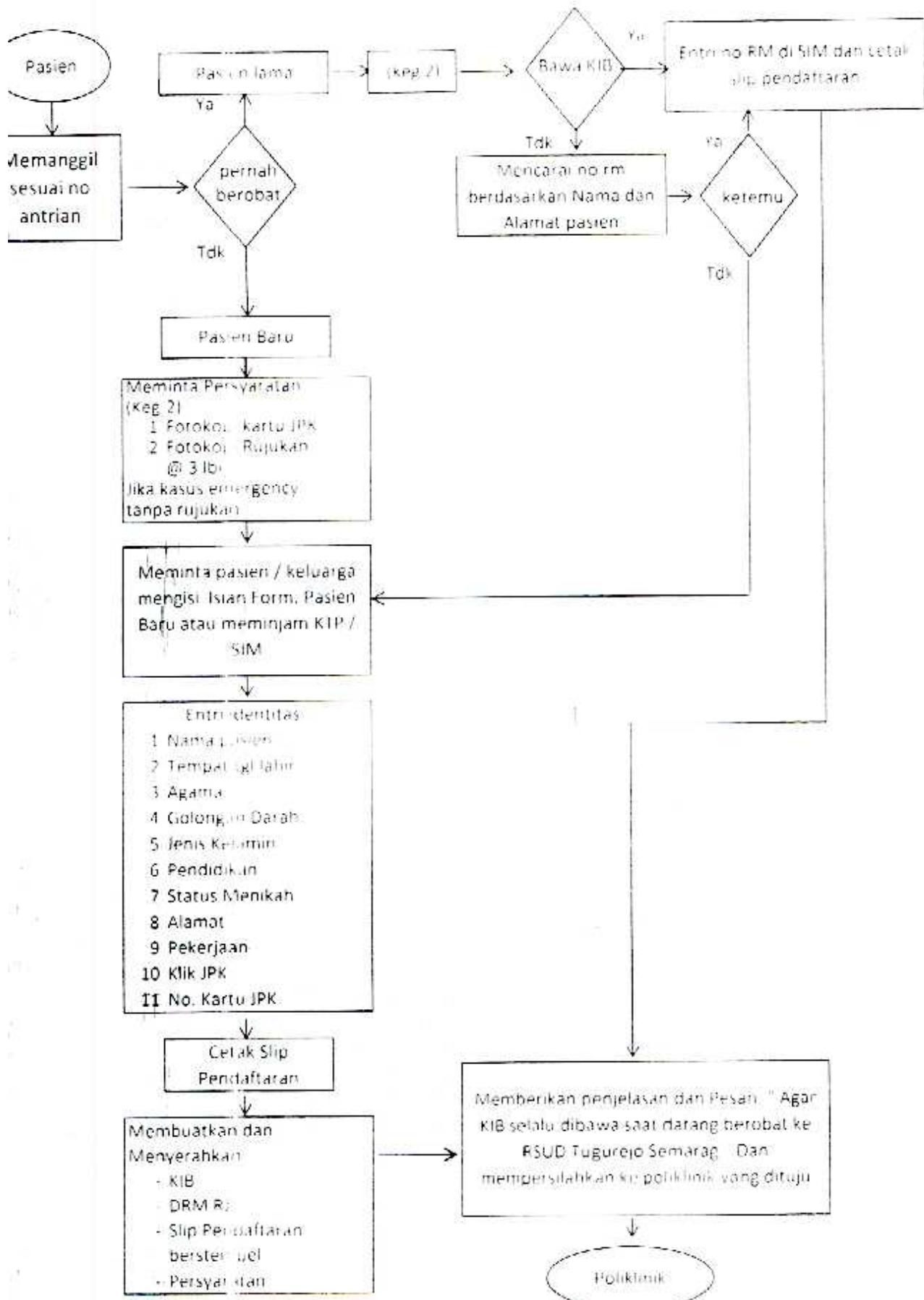
**ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN
JAMINAN JAMKESMAS NASIONAL**



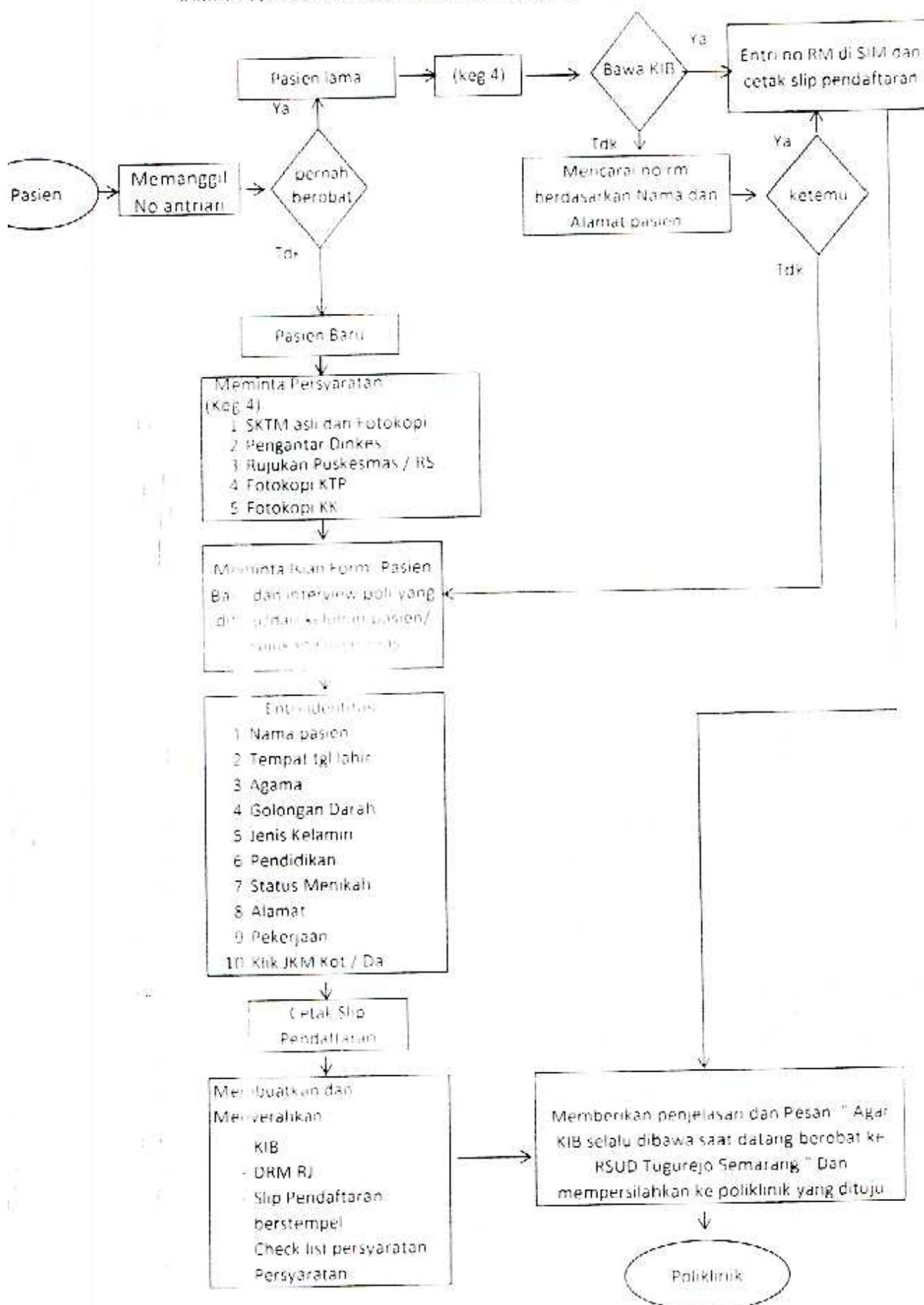
**ALIR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN
JAMINAN JAMPERSAL**



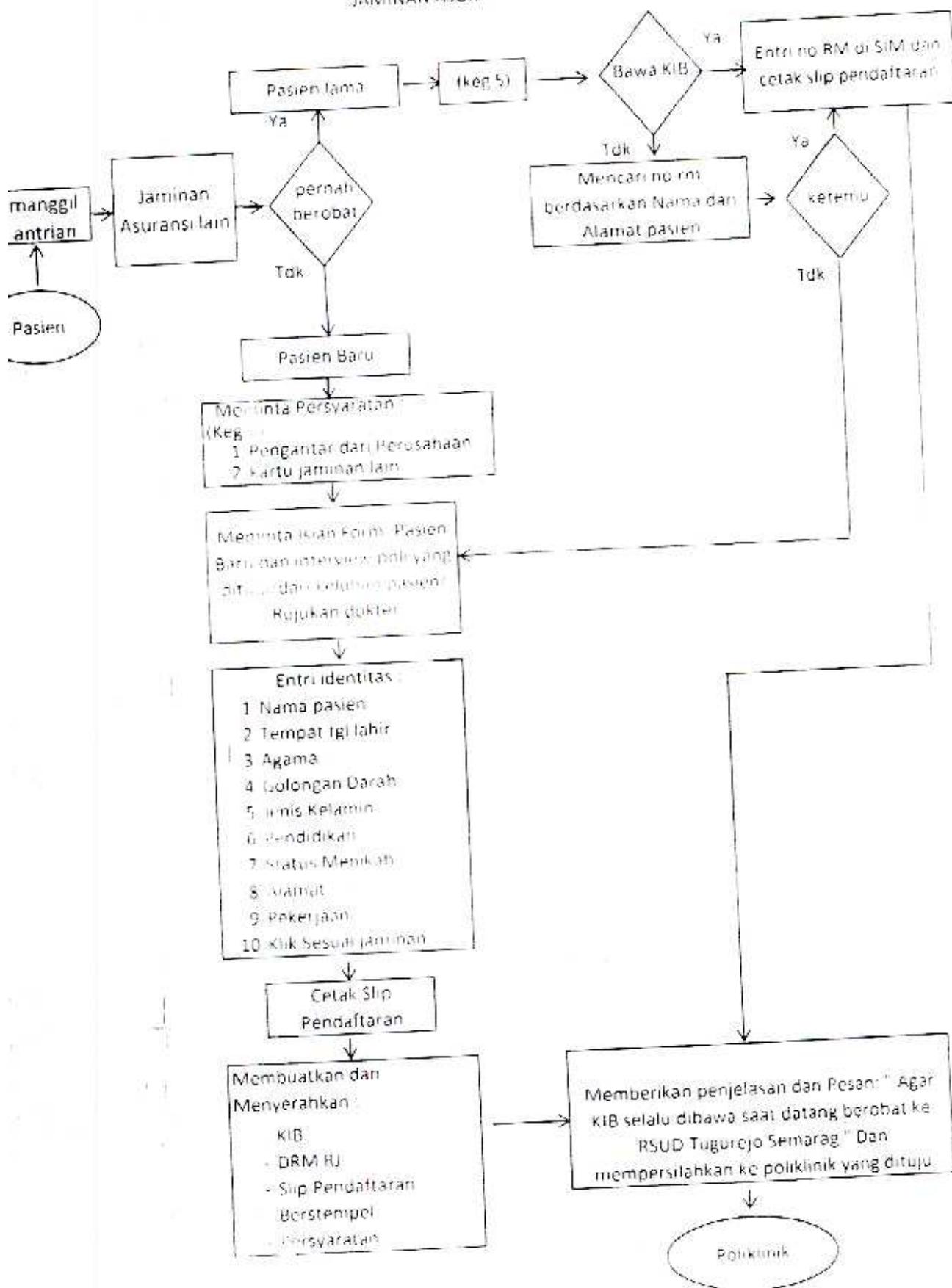
**AI-JR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN
JAMINAN JPK**



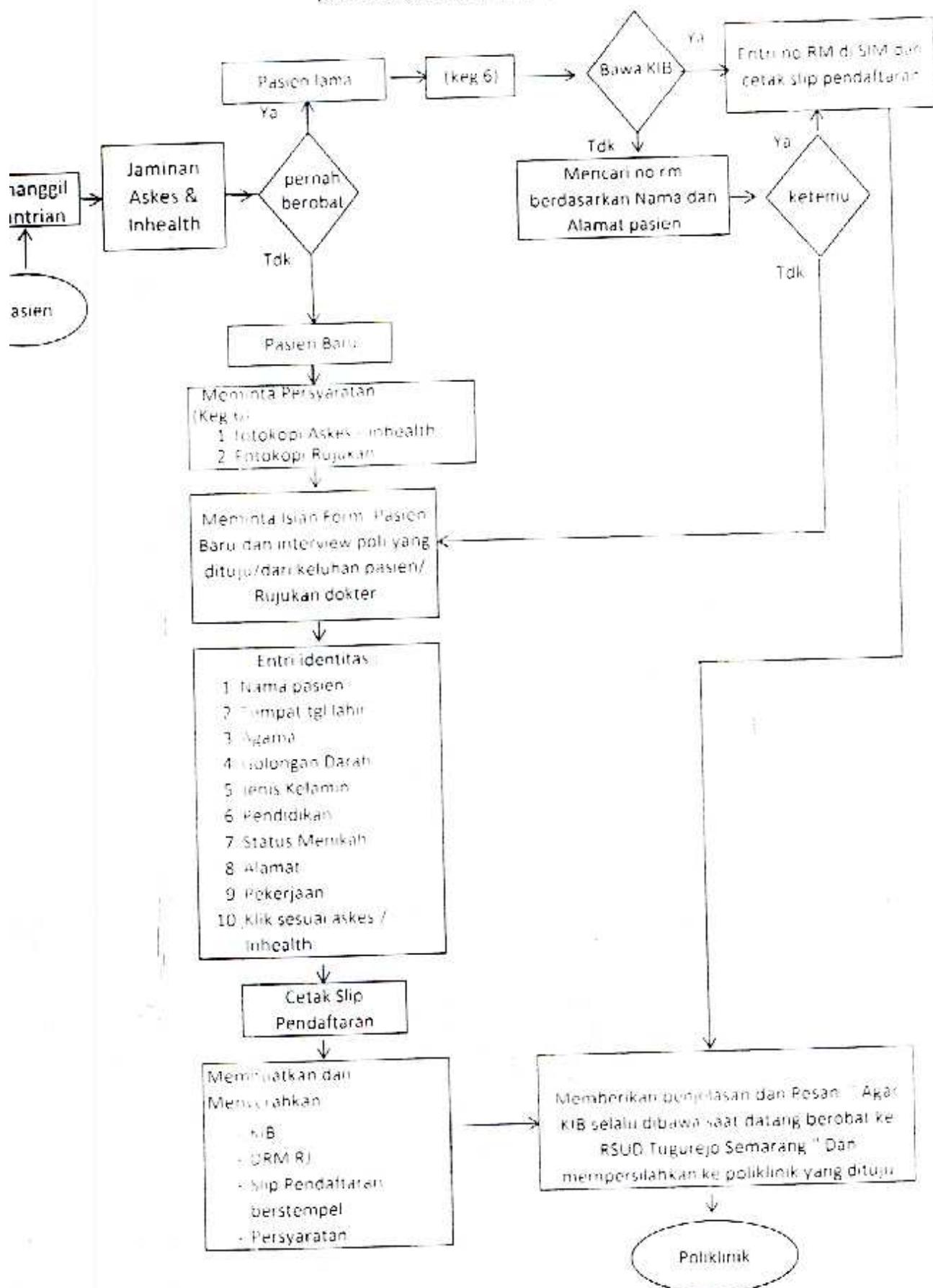
**ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN
JAMINAN JAMKESMAS KOTA SEMARANG DAN DAERAH LUAR KUOTA**



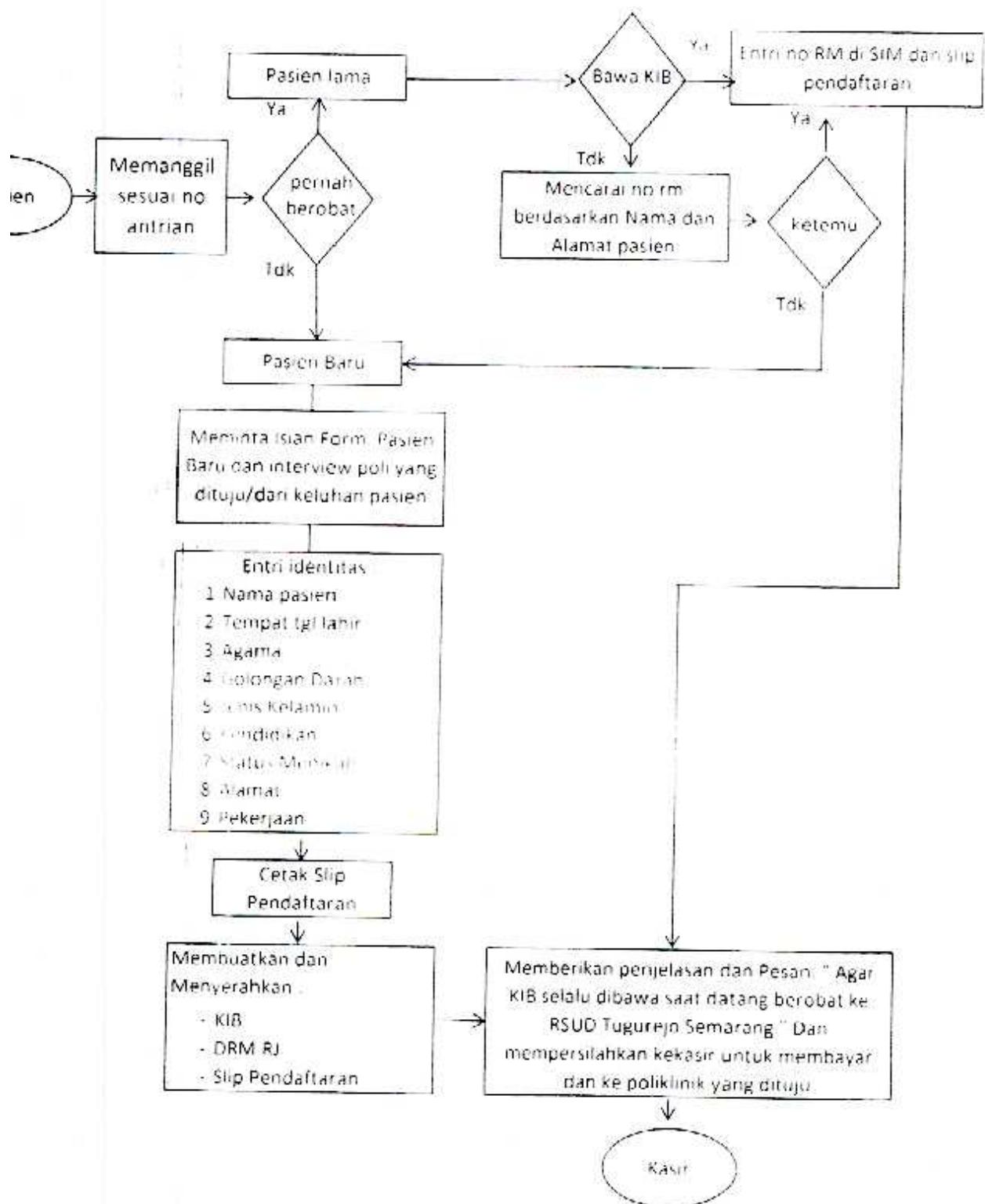
**ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN
JAMINAN ASURANSI LAIN**



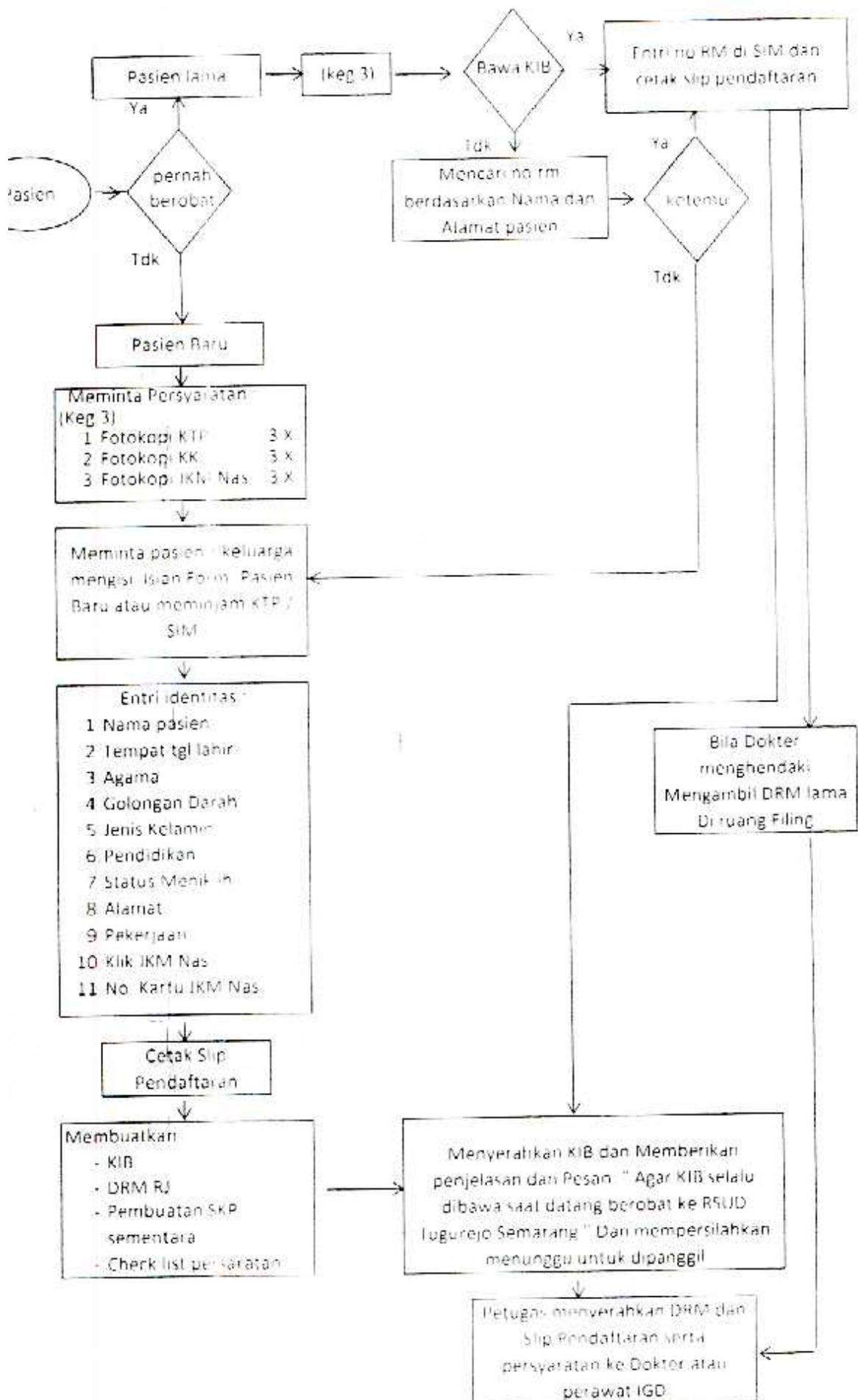
**ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN
JAMINAN ASKES DAN INHEALTH**

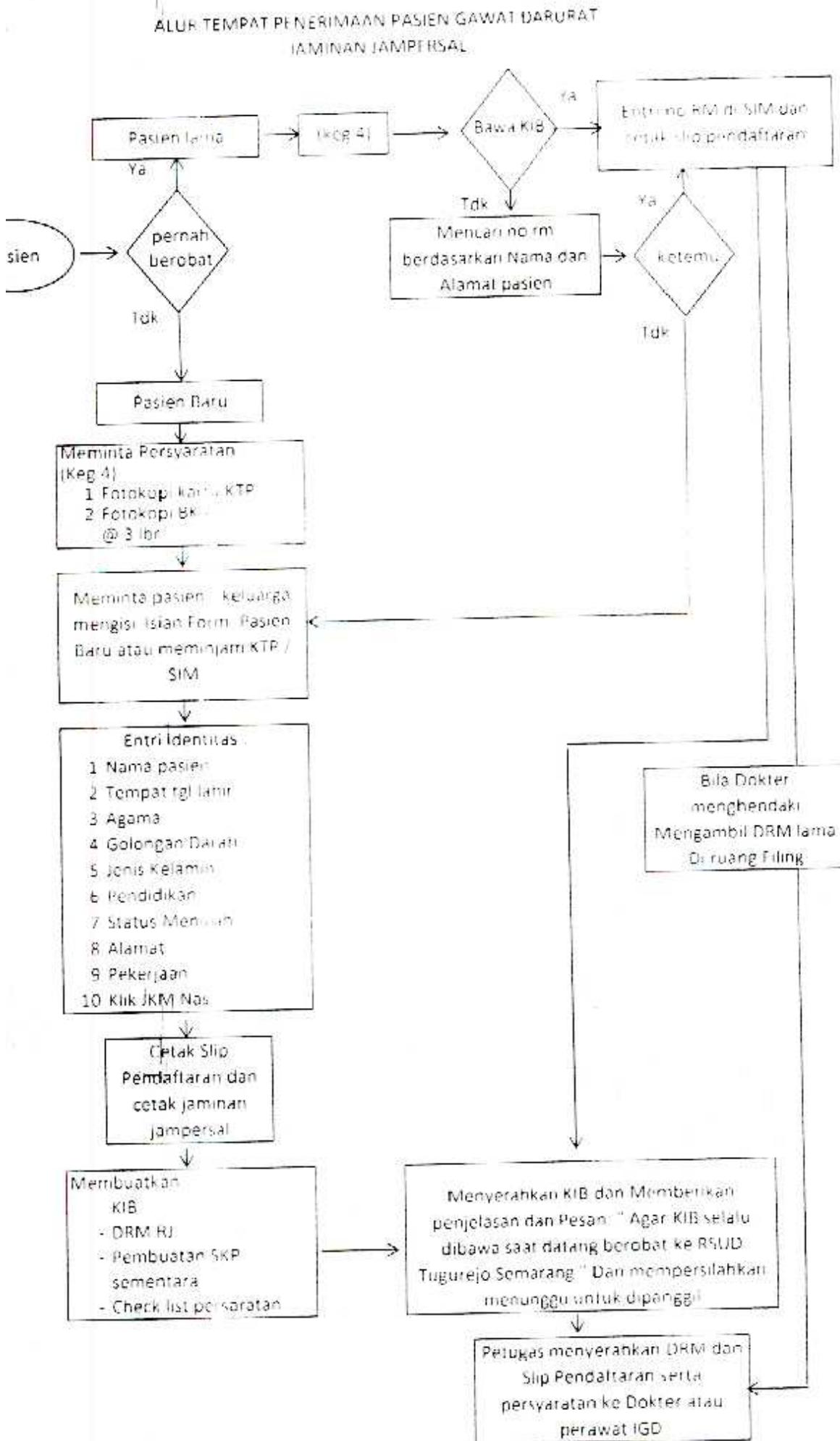


ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN
(AMINAN UMUM)

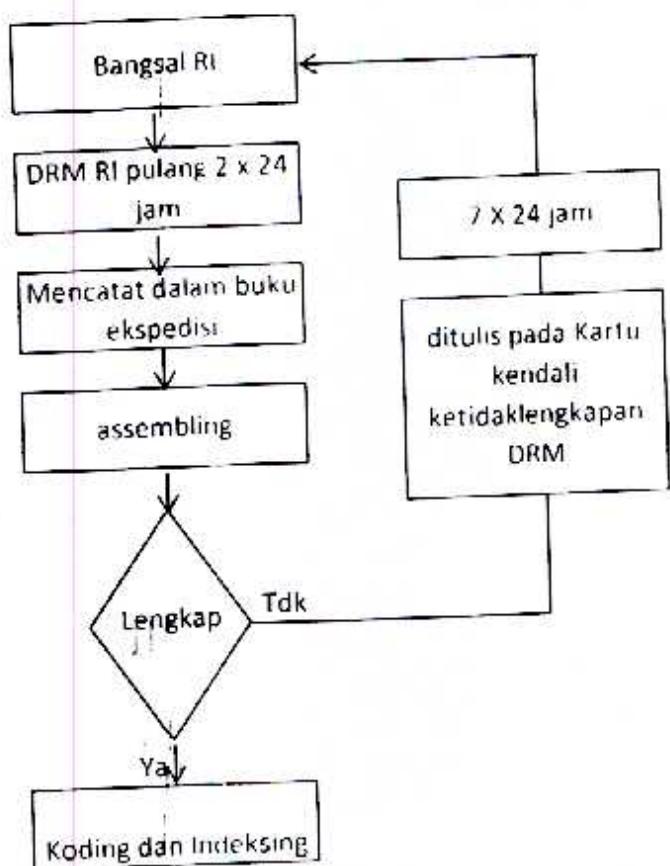


ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN GAWAT DARURAT
JAMINAN JAMKI SMAS NASIONAL

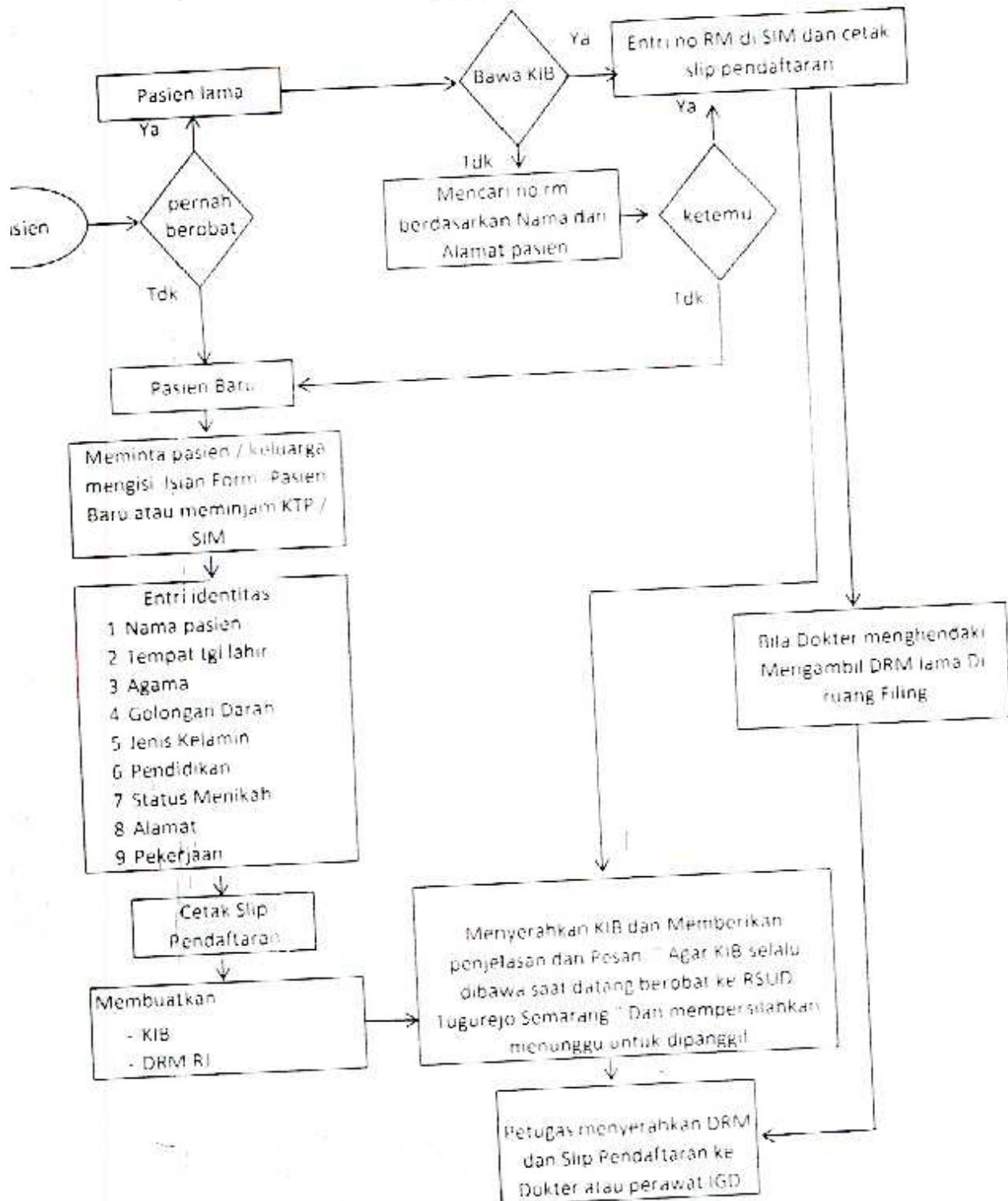




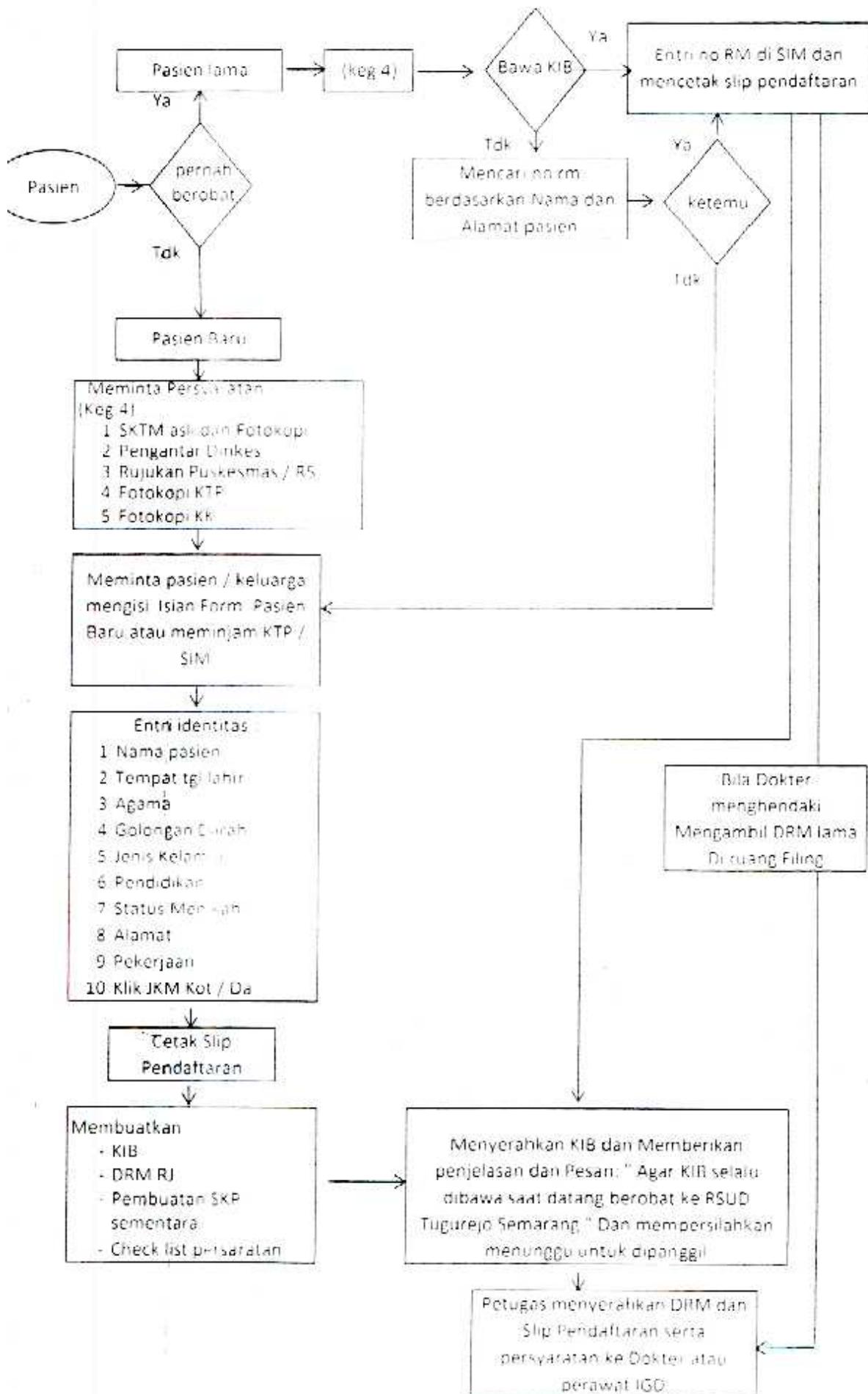
Alur Kelengkapan DRM Rawat Inap



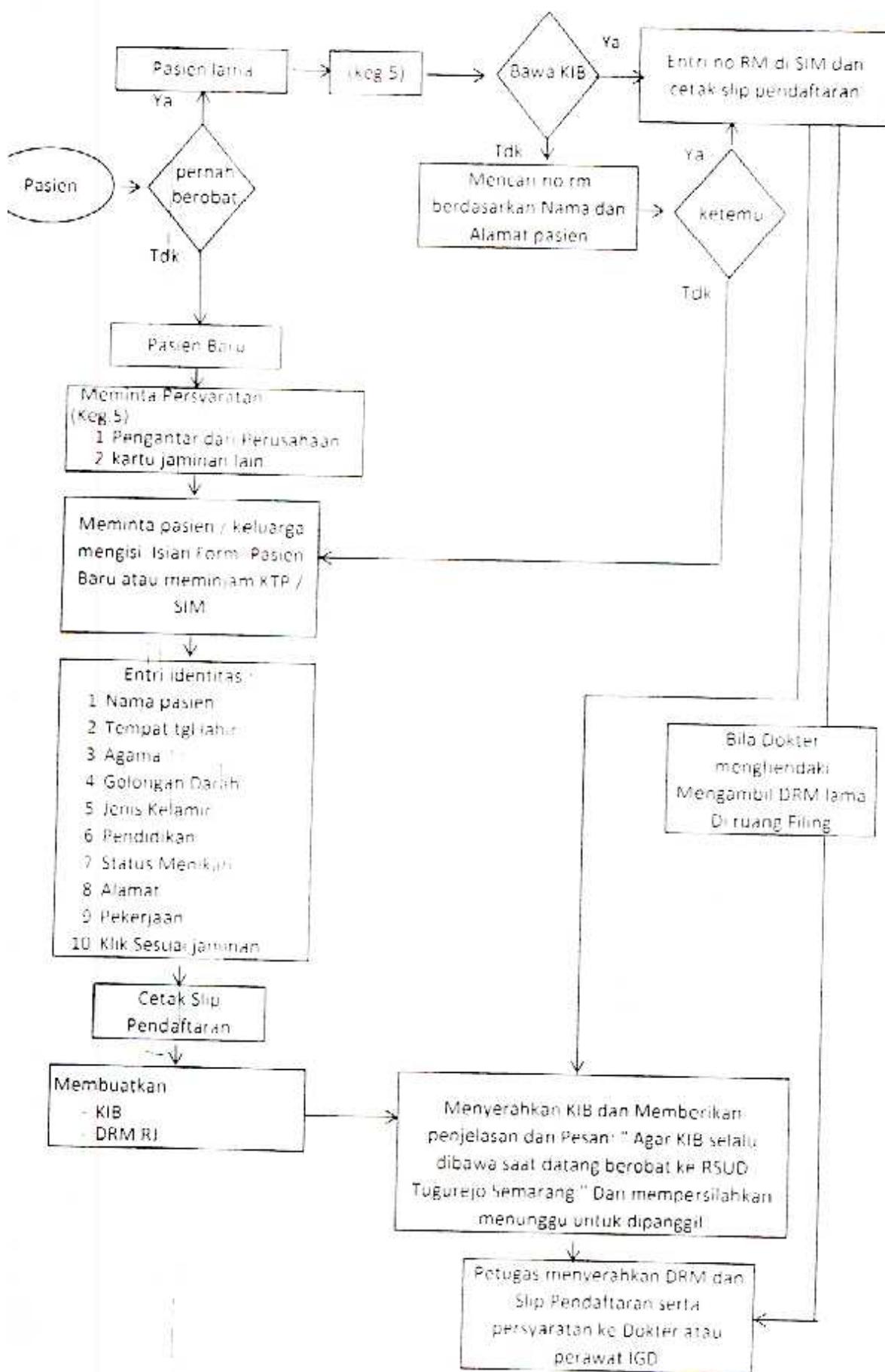
**ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN GAWAI DARURAT
JAMINAN UMUM**



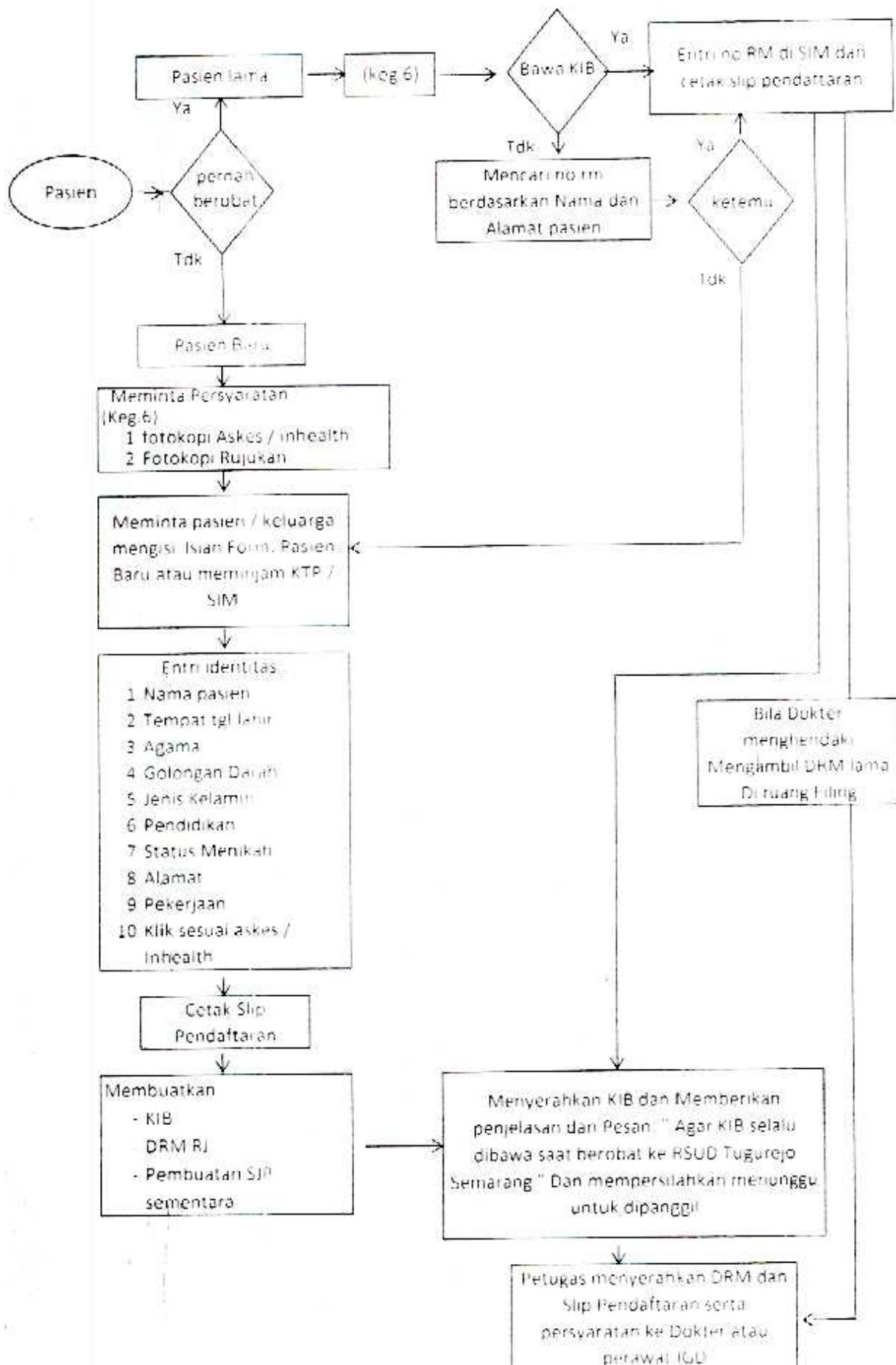
ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN GAWAT DARURAT
JAMINAN JAMKESMAS KOTA SEMARANG DAN DAERAH LUAR KUOTA



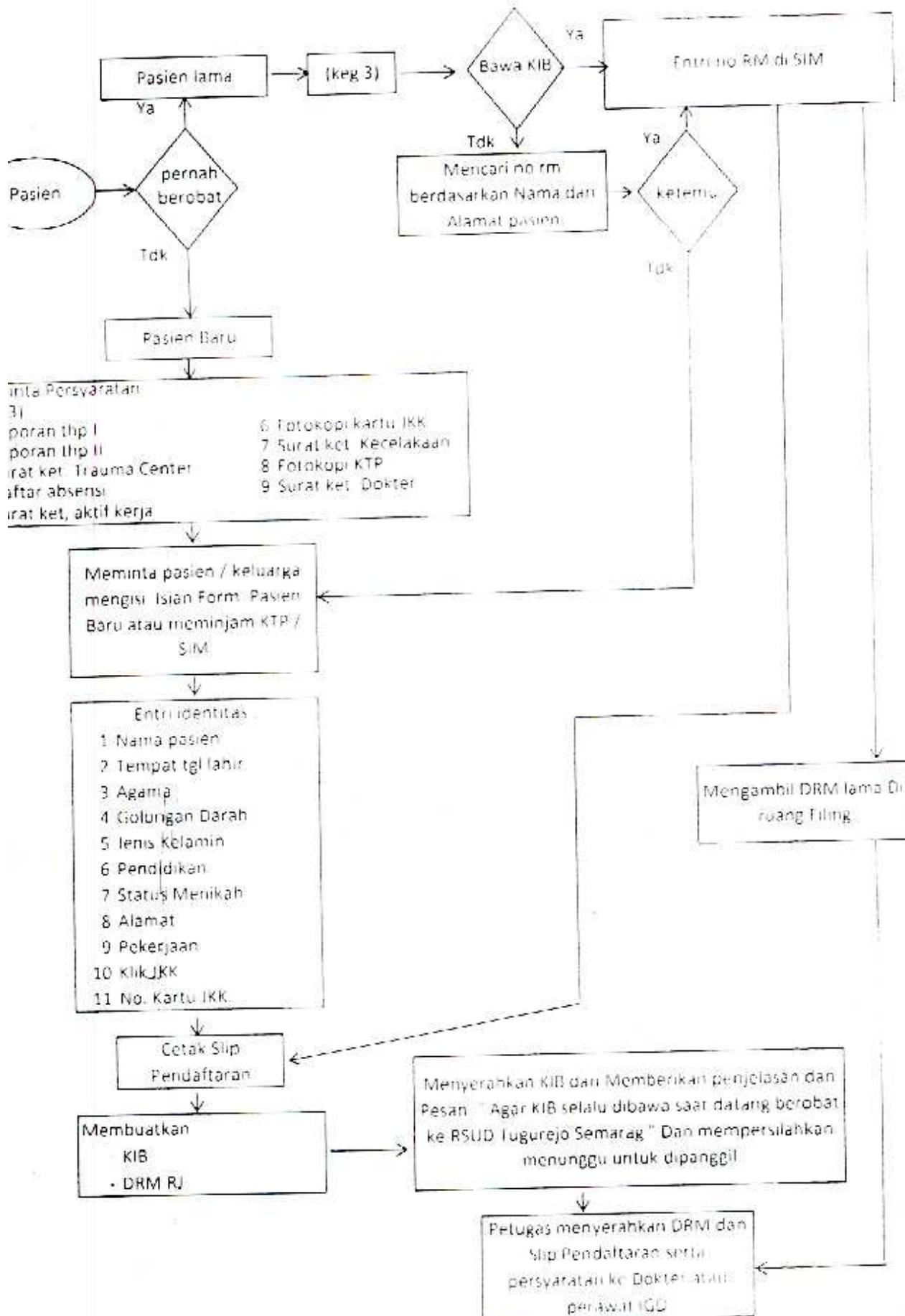
ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN GAWAT DARURAT
JAMINAN ASURANSI LAIN



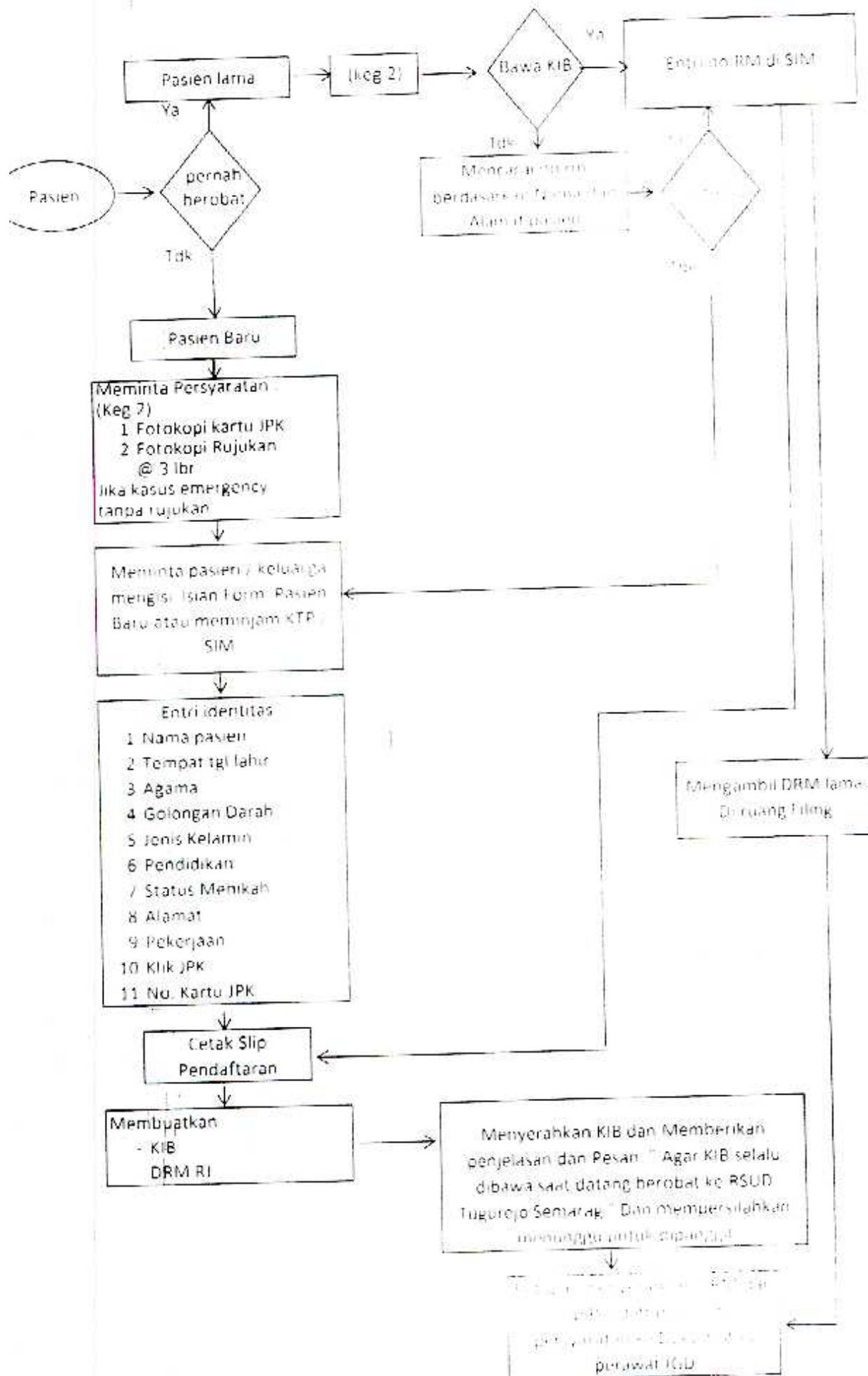
ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN GAWAT DARURAT
JAMINAN ASKES DAN INHEALTH



ALUR TEMPAT PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DIURAT
JAMINAN IKK



**ALUR TEMPAT PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DAURAT
JAMINAN JPK**



ALUR TEMPAT PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN JAMINAN IKR

